

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI SISWA SEKOLAH
MENENGA ATAS (SMA) SEBAGAI PEMILIH PEMULA DI
KABUPATEN LEMBATA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Pedagogi**



Diajukan oleh:

**MA'MUR APELABI
NIM: 202310660211051**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIKI BAGI
SISWA SEKOLAH MENENGA ATAS (SMA) SEBAGAI
PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN LEMBATA**

Diajukan oleh :

**MA'MUR APELABI
202310660211051**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Senin/ 30 Desember 2024**

Pembimbing Utama


Ascc. Prof. Ichsan Anshory Am


Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Latipur, Ph.D

Pembimbing Pendamping


Dr. Erna Yayuk

Ketua Program Studi
Magister Pedagogi


Dr. Agus Tinus

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MA'MUR APELABI
202310660211051

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Senin/ 30 Desember 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : **Ascc. Prof. Ichsan Anshory Am**
Sekretaris : **Dr. Erna Yayuk**
Penguji I : **Ria Arista Asih, Ph.D.**
Penguji II : **Dr. Agus Tinus**

SURAT PERNYATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **MA'MUR APELABI**
NIM : **202310660211051**
Program Studi : **Magister Pedagogi**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. **TESIS** dengan judul: **IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI SISWA SEKOLAH MENENGA ATAS (SMA) SEBAGAI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN LEMBATA** adalah karya saya, dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dalam dikutip dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Desember 2024

Yang menyatakan,



MA'MUR APELABI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Implementasi pendidikan politik bagi siswa sekolah menengah atas (SMA) sebagai pemilih pemula” dapat terselesaikan.

Selama penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa semua tidak akan selesai dengan baik tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Latipun, Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Dr. Agus Tinus, M.Pd, selaku Ketua Program studi Magister Pedagogi.
3. Assc. Prof. Dr. Ichsan Anshory, AM. M.Pd, Selaku pembimbing utama.
4. Dr. Erna Yayuk M.Pd selaku pembimbing pendamping yang selalu meluangkan waktu serta memberikan saran dan masukkan dalam proses penyelesaian Tesis.
5. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf pengajar Program Magister Pedagogi yang telah memberikan banyak saran berharga dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman di Prodi Magister Pedagogi yang telah saling mendukung dan memotivasi. Keberadaan kalian semua telah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan Tesis ini.

Malang, 30 Desember 2024

ABSTRAK

Apelabi Ma'mur 2024. *Implementasi pendidikan politik bagi siswa sekolah menengah atas (SMA) sebagai pemilih pemula*. Tesis, Program Studi Magister Pedagogi, Direktorat Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang. Assc. Prof. Dr. Ichsan Anshory AM, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Utama, Dr. Erna Yayuk, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Pendamping. E-mail: cakmur08@gmail.com

Pendidikan politik memiliki peranan krusial dalam membentuk generasi muda yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendidikan politik bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai pemilih pemula. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik di sekolah dilaksanakan melalui berbagai cara, seperti pembelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), diskusi tematik, simulasi pemilu, dan partisipasi siswa dalam organisasi intra-sekolah. Tujuan dari implementasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai sistem politik, pentingnya partisipasi dalam pemilu, serta cara menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi, antara lain kurangnya pemahaman guru mengenai materi politik terkini, alokasi waktu pembelajaran yang terbatas, serta minimnya keterlibatan langsung siswa dalam aktivitas politik yang nyata. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kurikulum pendidikan politik serta kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan penyelenggara pemilu untuk memberikan pendidikan politik yang lebih komprehensif dan kontekstual. Dengan demikian, siswa SMA dapat lebih siap untuk berpartisipasi aktif sebagai pemilih pemula yang bertanggung jawab, dalam mendukung demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci : *Implementasi, Pendidikan Politik, Pemilih Pemula*

ABSTRACT

Apelabi Ma'mur 2024. *Implementation of political education for high school (SMA) students as novice voters*. Thesis, Master of Pedagogy Study Program, Directorate of Postgraduate Programs, Muhammadiyah University of Malang. Assc. Prof. Dr. Ichsan Anshory AM, M.Pd., as Main Supervisor, Dr. Erna Yayuk, M.Pd., as Assistant Supervisor. E-mail: cakmur08@gmail.com

Political education has an important role in forming a young generation who understands their rights and obligations as citizens. This research aims to implement political education for senior high school (SMA) students as novice voters. The method used in this research is qualitative research with a descriptive approach which includes observation, interviews and document analysis. The research results show that political education in schools is implemented through various means, such as PPKn (Pancasila and Citizenship Education) learning, thematic discussions, election simulations, and student participation in intra-school organizations. The aim of this implementation is to increase students' understanding of the political system, the importance of participation in elections, and how to become intelligent and critical voters. However, there are still challenges faced, including teachers' lack of understanding of the latest political material, limited allocation of learning time, and the lack of direct involvement of students in real political activities. This research suggests the need to strengthen the political curriculum and collaboration between schools, government and election organizers to provide more comprehensive and contextual political education. In this way, high school students can be better prepared to participate actively as responsible beginner voters, in supporting democracy in Indonesia.

Keywords: *Implementation, Political Education, New Voters*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
2. Kajian Teori	6
2.1 Pengertian Pendidikan Dan Politik	6
2.2 Siswa sebagai pemilih pemula	9
3. Metodelogi penelitian	12
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	12
3.2 Waktu dan lokasi penelitian	13
3.3 Subjek Penelitian	13
3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Intrumen Penelitian	13
3.5 Teknik pengolahan dan analisa data	15
3.6 Uji keabsahan data	16
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	16
4.1 Hasil Penelitian	16
4.2 Pembahasan	25
5. KESIMPULAN DAN SARAN	33
5.1 Kesimpulan	33
5.2 SARAN	34
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

Tabel. 3.4. 1 Panduan Observasi.....	13
Tabel. 3.4. 2 Pedoman Wawancara Untuk Pemilu Pemula.....	14



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang menciptakan ruang bagi keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Dalam negara yang menganut prinsip demokrasi, kekuasaan dimiliki dan dikendalikan oleh rakyat, dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat, (Akhmad, Thamrin, dan Santosa 2023). Ciri utama dari suatu negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum (Pemilu). Dalam konteks ini, nilai demokrasi yang sangat penting untuk dijunjung tinggi adalah toleransi. Toleransi perlu ditanamkan dalam diri siswa SMA, yang merupakan pemilih pemula, agar mereka dapat menghargai dan menghormati perbedaan. Dengan demikian, diharapkan demokrasi akan terus tumbuh dan berakar kuat dalam masyarakat kita, (Rukmini, 2021). Dengan demikian, demokrasi akan tumbuh dan menjadi kuat jika di kalangan masyarakat, terutama di antara siswa SMA, tercipta kultur dan nilai-nilai demokrasi yang mendalam.

Demokrasi adalah wujud kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia, berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Dalam konteks pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, demokrasi mencakup kebebasan berpendapat, partisipasi aktif, penghargaan terhadap perbedaan, kesetaraan, serta kerjasama antarindividu dan kelompok (Pada et al., 2022). Salah satu cara pemilih pemula dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi adalah dengan menjadi saksi langsung dalam penghitungan suara, selain menggunakan hak suara mereka. Mereka memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi tanpa ada larangan dari pihak manapun.

Pendidikan politik merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan orientasi politik individu, (Affandi, 2019). Pendidikan politik dapat dipahami sebagai sebuah upaya yang dilakukan dengan sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik di masyarakat. Tujuan dari usaha ini adalah agar masyarakat dapat memahami dan meresapi dengan baik

nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal, (Ma et al., 2019).

Bentuk pendidikan politik di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai pemilih pemula perlu disesuaikan dengan kebutuhan mereka untuk memahami nilai-nilai demokrasi, hak politik, dan sistem pemerintahan. Program pendidikan ini mencakup pembelajaran mengenai struktur negara, proses pemilihan umum, serta pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Dengan mengadopsi metode pembelajaran yang melibatkan diskusi, simulasi, dan studi kasus, siswa diberikan kesempatan untuk memahami dinamika proses politik dan peran mereka sebagai pemilih dalam menentukan kebijakan publik (Syarifah et al., 2022). Dengan cara ini, diharapkan pendidikan politik di SMA dapat mempersiapkan siswa untuk menjadi pemilih yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab.

Pendidikan politik untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki peran yang sangat krusial, terutama mengingat mereka akan menjadi pemilih pemula dalam pemilu yang akan datang. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai sistem politik, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara, sekaligus menekankan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi (Rahman 2021). Melalui pendidikan politik, siswa diajak untuk mengenal seluk-beluk pemilihan umum, memahami isu-isu politik terkini, dan dilatih agar dapat menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan politik ini tidak hanya membantu membentuk generasi muda yang menyadari hak-haknya, tetapi juga mendorong mereka untuk berperan aktif dalam kehidupan politik bangsa.

Politik tidak dapat dipisahkan dari partisipasi warga negara. Pelaksanaan partisipasi politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015, yang menjamin dan melindungi hak-hak sipil serta politik setiap individu. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berserikat, hak untuk memilih dan dipilih, persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan, serta hak untuk mendapatkan keadilan. Salah satu cara yang efektif untuk

meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap politik adalah melalui pendidikan (Lubis, 2023).

Saat ini, dalam pelaksanaan pemilihan umum, semakin banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi aktif dalam mengawasi kegiatan partai politik, termasuk dalam proses perekrutan calon legislatif. Bahkan, banyak yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Sikap apatis masyarakat semakin terlihat, di mana mereka mulai kehilangan kepercayaan terhadap janji-janji partai politik yang dianggap hanya sekadar pidato menarik saat pemilu. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap partai politik pun semakin menurun (Pahmi, Dedi, dan Suwarlan 2019).

Sikap masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Selain itu, rasa jenuh terhadap proses pemilihan dan tidak mengertian mengenai mekanisme pemilu juga turut berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi, (BR et al., 2023). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sangatlah penting. Menurut Herbert McClosky, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai kegiatan sukarela yang dilakukan oleh individu untuk terlibat dalam proses pemilihan pemimpin, serta secara langsung atau tidak langsung ikut berkontribusi dalam pembentukan kebijakan (Rokim, 2019).

Pemilih pemula didorong untuk memilih berdasarkan hati nurani mereka sendiri, tanpa terpengaruh oleh orang lain. Tingginya rasa ingin tahu yang dimiliki pemilih pemula membuat mereka antusias untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pasca-demokrasi di wilayah mereka. Selain itu, sangat penting bagi pemilih pemula untuk menghargai pendapat dan pilihan orang lain yang mungkin berbeda. Partisipasi kooperatif mereka terlihat dalam dukungan aktif dan keterlibatan langsung dalam pemilihan umum.

Upaya untuk meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan kesadaran berpolitik dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Baik penyelenggara pemilu, peserta politik, maupun kalangan akademisi, terutama di perguruan tinggi, memiliki peran penting dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

(Muhammad dan Babas 2020). Salah satu faktor penting dalam pemilihan umum adalah tingkat partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi, semakin jelas menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu dan pilkada.

Meskipun rendahnya tingkat partisipasi tidak dapat membatalkan hasil pemilihan, hal ini tetap mencerminkan kesadaran politik masyarakat, khususnya siswa SMA yang merupakan pemilih pemula. Mereka memiliki peran sentral dalam menentukan arah suatu daerah. Oleh karena itu, perilaku pemilih pemula menjadi indikator kualitas demokrasi, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang, (Noprianto et al., 2023). Partisipasi politik pemilih pemula adalah manifestasi dari suatu negara yang demokratis, di mana mereka terlibat langsung dalam proses Pemilihan Umum. Dalam konteks ini, pemilih pemula sebagai warga negara memiliki peranan yang sangat penting dalam memilih para pejabat negara, yang nantinya akan menentukan arah pemerintahan dan kebijakan yang akan diambil.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula meliputi: a. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/ Pernah menikah, b. Mereka yang memberikan suara untuk pertama kalinya dalam pemilu di Indonesia ketika berusia 17 tahun. Pemilih pemula adalah individu yang berhak memilih dalam pemilu dan akan berusia 17 tahun atau lebih pada saat pemungutan suara berlangsung. Meskipun segmen pemilih pemula ini memiliki jumlah yang cukup signifikan, mereka cenderung mengalami apatisme dan sering kali mengikuti arus dalam menentukan keputusan politik mereka (Azirah, 2019). Pemilih muda dalam pemilihan umum adalah generasi baru yang memiliki karakteristik, latar belakang, pengalaman, dan tantangan yang berbeda dari generasi sebelumnya, (Nur Wardhani, 2018).

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak positif bagi kelompok ini, karena mereka mampu memanfaatkan berbagai alat canggih seperti ponsel, laptop, tablet, dan perangkat lainnya. Selain itu, media sosial berperan penting dalam membangun kesadaran politik di kalangan siswa SMA. Dengan membagikan konten politik yang relevan dan informatif melalui platform-

platform tersebut, siswa dapat lebih mudah memahami isu-isu politik yang sedang berlangsung, (Razaqa, Prawira, dan Santoso 2022). Pemahaman ini menjadi kunci untuk mempersiapkan mereka menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan progresif. Mengingat bahwa pemilih muda ini akan menyongsong peran kepemimpinan di masa depan, terutama menjelang peringatan 100 tahun Republik Indonesia pada tahun 2045, keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini sangat ditentukan oleh pilihan mereka.

Dalam pemilihan umum maupun pilkada, pemilih pemula memegang peranan yang sangat penting. Mereka merupakan generasi baru dalam dunia pemilihan yang membawa sifat, karakter, latar belakang, pengalaman, dan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan pemilih dari generasi sebelumnya, (Gurning et al., 2023). Pemilih pemula adalah individu yang memiliki sifat rasional, yang berarti mereka perlu diarahkan untuk memahami latar belakang calon dan mengevaluasi tawaran visi serta misi yang disampaikan kepada mereka, (Mahyudin et al., 2022). Diharapkan agar tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum maupun pilkada dapat mencapai angka yang tinggi.

Kabupaten Lembata sebagai daerah yang berpotensi untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih pemula. Dimana Siswa-siswi kelas XI dan XII di SMA Negeri 1 Balauring yang berada di kabupaten lembata, yang mayoritas berusia 17 tahun atau lebih, telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah cukup signifikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan informasi melalui sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan politik siswa-siswi yang tergolong sebagai pemilih pemula, serta untuk menumbuhkan partisipasi dan kesadaran mereka tentang pentingnya pemilihan umum (Boinawu, Arifin, dan Kadir 2024). Kegiatan ini merupakan bagian penting dari pembelajaran tentang berdemokrasi yang berlandaskan Pancasila.

Kabupaten Lembata, khususnya Kecamatan Balauring, memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih pemula, terutama di kalangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Balauring. Saat ini,

siswa kelas XI dan XII di sekolah tersebut belum memperoleh pendidikan politik secara berkelanjutan. Padahal, di usia remaja, pemilih pemula ini sangat membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam berdemokrasi, serta cara berpartisipasi aktif dalam proses politik. Dengan mengimplementasikan pendidikan politik yang terstruktur dan terus-menerus, Kabupaten Lembata dapat mencetak generasi muda yang sadar politik, kritis, dan siap berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun bangsa.

Bedasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai implementasi pendidikan politik bagi siswa sekolah menengah atas sebagai pemilih pemula di kabupaten lembata. Pemasalahan yang ingin digali dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana bentuk pendidikan politik yang dilakukan sekolah terhadap siswa SMA sebagai pemilih pemula?, serta 2) Bagaimana peranan sekolah dalam memberikan pendidikan politik bagi siswa SMA sebagai pemilih pemula di Kabupaten Lembata?

2. Kajian Teori

2.1 Pengertian Pendidikan Dan Politik

2.1.1 Pendidikan Politik

Menurut (Didik, 2024) pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang menuju kebaikan, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan pengalaman secara terencana dan berkelanjutan. Melalui pendidikan, kita diarahkan untuk menjadi individu yang berbudi pekerti, serta berkembang menjadi pribadi dewasa yang memiliki landasan ideologi, nilai, dan budaya yang kuat, (Tâm et al., 2016).

Pendidikan adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pendidikan, generasi ini diharapkan dapat menjadi teladan bagi pengajaran yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya, (Rahman et al., 2022), sementara Menurut (Nasution et al., 2024) Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa untuk mendukung perkembangan anak menuju kedewasaannya. Tujuan dari pendidikan ini adalah agar anak dapat mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk

menjalani hidupnya secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan orang lain, (Djabba & Ilmi, 2022). Pendidikan, dalam pengertian yang sederhana dan umum, dapat dipahami sebagai upaya manusia untuk mengembangkan dan menumbuhkan potensi yang dimiliki, baik secara fisik maupun mental, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan budaya. Pendidikan menjadi sebuah fenomena kebudayaan yang mencakup nilai-nilai moral, estetika, dan budaya yang lebih luas, (Sa'ban et al., 2022).

Pendidikan politik ialah pemahaman aspek-aspek politik dari setiap permasalahan. Dan pemahaman politik berarti pemahaman konflik (Keguruan et al., 2020). Konflik dalam masyarakat manusia sering kali muncul akibat adanya kontroversi dan perbedaan dalam pemikiran serta perilaku. Keberagaman ini, di samping adanya kesamaan keinginan dan sikap, menciptakan suasana persaingan, kompetisi, dan akhirnya, konflik. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat berarti menjalani interaksi yang sarat dengan berbagai dimensi konflik dan ketegangan. Di sisi lain, politik dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjuangan kolektif, lengkap dengan segala kebijakannya, untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini melibatkan upaya untuk mempengaruhi individu agar mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, wawasan yang lebih jelas, dan keterampilan politik yang lebih objektif terkait dengan lingkungan politik di sekitarnya.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, dalam upaya pendidikan politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharuskan untuk memfasilitasi penyebaran materi kampanye yang mencakup visi, misi, dan program melalui situs resmi KPU serta lembaga penyiaran publik. Pelaksanaan kampanye pemilu, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, berlangsung selama dua puluh satu hari dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang. Konsep pendidikan politik terdiri dari dua kata kunci utama: pendidikan dan politik. Pendidikan berkaitan erat dengan politik, di mana hubungan antara keduanya bersifat empiris dan telah terjalin sejak lama (Asdrayany et al., 2023). Dalam konteks ini, pendidikan adalah proses yang dilakukan secara sengaja untuk menggali dan mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka mampu merespons lingkungan secara

positif atau melakukan perubahan yang berarti dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku bagi diri mereka sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Sementara itu, politik adalah usaha untuk membentuk peraturan yang diterima secara luas oleh masyarakat, dengan tujuan menciptakan kehidupan bersama yang harmonis.

Pendidikan politik bertujuan untuk mendidik individu dan masyarakat agar dapat mengubah sikap dan perilaku mereka. Hal ini penting agar mereka memahami dan mengapresiasi nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang benar, yang diimplementasikan di lingkungan masyarakat dan negara di mana mereka tinggal. Dengan pendidikan politik, pengetahuan masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga mendorong partisipasi aktif mereka dalam sistem politik, (Akhmad et al., 2023). Dengan adanya pendidikan politik, fokus tidak hanya pada pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa dan konflik politik, tetapi juga pada meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam aktivitas politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati.

2.1.3 Partisipasi politik

Partisipasi politik merujuk pada aktivitas individu atau kelompok untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti memilih pemimpin negara secara langsung atau turut memengaruhi kebijakan publik (Affandi, 2019). Kegiatan ini meliputi berbagai tindakan, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, bergabung dengan partai atau kelompok kepentingan, serta menjalin komunikasi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Dari penjelasan di atas, partisipasi politik dapat diartikan sebagai keterlibatan warga negara biasa, yang tidak memiliki kekuasaan dalam pemerintahan, untuk secara sadar mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam penelitian ini, partisipasi politik dimaksudkan sebagai hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencapai keberhasilan pendidikan politik. Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu, kelompok, atau organisasi dalam aktivitas politik secara aktif. Contoh-contoh partisipasi ini meliputi ikut serta dalam pemilu, berusaha memengaruhi pengambilan keputusan, serta berpartisipasi dalam partai politik. (Nur Wardhani, 2018). Partisipasi politik mencerminkan

aspek mental dan emosional yang mendorong individu untuk berkontribusi pada tujuan atau cita-cita kelompok, serta merasakan tanggung jawab terhadapnya.

2.2 Siswa sebagai pemilih pemula

2.2.1 Pengertian siswa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa siswa adalah "anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia di berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu." Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu adalah unik; meskipun secara fisik mereka mungkin memiliki kesamaan, pada dasarnya, mereka berbeda dalam hal bakat, minat, dan kemampuan. Selain itu, setiap individu juga merupakan makhluk yang terus berkembang.

Murid adalah individu yang sedang menjalani proses perkembangan sesuai dengan potensi alami mereka. Dalam perjalanan ini, mereka memerlukan bimbingan dan arahan yang konsisten untuk mencapai titik optimal dari kemampuan yang dimiliki sesuai dengan fitrah masing-masing, (Ansori, 2015). Murid merupakan salah satu unsur penting dalam proses pengajaran, bersama dengan guru, tujuan, dan metode pengajaran. Pada dasarnya, murid adalah penentu utama dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya murid, proses pengajaran tidak akan pernah terjadi. Dalam konteks pendidikan di sekolah, siswa berperan sebagai komponen kunci yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Mereka tidak hanya sebagai subjek yang belajar, tetapi juga sebagai objek dari proses tersebut, karena merekalah yang menjalani kegiatan belajar, sekaligus menjadi sasaran dari aktivitas itu sendiri. Melalui proses belajar, diharapkan siswa mengalami perubahan dalam pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, anak didik merupakan unsur manusiawi yang sangat vital dalam interaksi edukatif. Keberadaan mereka menjadi fokus dalam seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran, yang menunjukkan bahwa siswa memegang peranan penting dalam kelangsungan proses belajar dan pencapaian tujuan pendidikan.

2.2.2 Pemilih Pemula

Pengertian pemilih pemula menurut UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam Bab IV pasal 198 ayat 1, menyatakan bahwa pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah, dan memiliki hak untuk memilih. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula adalah warga Negara yang terdaftar dalam daftar pemilih yang disusun oleh penyelenggara pemilu dan yang untuk pertama kalinya memberikan suaranya dalam pemilu di Indonesia pada usia 17 tahun atau lebih, (Islah et al., 2020), hal ini juga sejalan dengan pendapat (Isyanawulan & Hendarso, 2023). Kelompok pemilih pemula umumnya terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Dalam ritual demokrasi seperti Pemilu Legislatif dan Pilpres, pemilih pemula sering kali dianggap sebagai objek dalam kegiatan politik. Mereka adalah individu yang memerlukan pembinaan dan pengembangan untuk menumbuhkan potensi dan kemampuan mereka, sehingga dapat berperan secara optimal di bidang politik.

Pemilih pemula menunjukkan antusiasme yang besar, meskipun keputusan mereka masih belum sepenuhnya mantap. Hal ini membuat mereka sebenarnya menjadi *swing voters* yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum terikat pada motivasi ideologis tertentu; sebaliknya, mereka lebih dipengaruhi oleh dinamika lingkungan politik lokal yang ada. Oleh karena itu, pemilih pemula cenderung mudah terpengaruh oleh berbagai kepentingan, terutama oleh orang-orang terdekat, seperti anggota keluarga, dari orang tua hingga kerabat dan teman, (Hasanah & Sulha, 2023). Selain itu, media massa memiliki pengaruh signifikan terhadap pilihan pemilih pemula. Ini dapat terlihat dari berbagai bentuk media, seperti berita di televisi, spanduk, brosur, poster, dan lainnya. Pemilih pemula, khususnya remaja berusia 17 tahun, cenderung mengedepankan nilai-nilai kebudayaan yang santai dan bebas, dengan ketertarikan pada hal-hal yang bersifat informal serta pencarian kesenangan. Oleh karena itu, mereka cenderung menghindari pengalaman yang tidak menyenangkan. Selain mencari hiburan, kelompok sebaya juga memegang peranan penting dalam kehidupan seorang

remaja, memiliki teman-teman dalam pergaulan menjadi hal yang krusial bagi mereka. (oleh: I Gede Suka Astreawan, Anggota KPU Kabupaten Klungkung, 14 Juli 2022)

Pemilih pemula di dunia politik adalah kelompok baru yang untuk pertama kalinya menggunakan hak pilih mereka. Orientasi politik mereka cenderung dinamis dan dapat berubah sejalan dengan berbagai kondisi serta faktor yang memengaruhi. Meskipun demikian, keberadaan pemilih pemula menawarkan potensi yang signifikan dalam setiap pemilihan umum. Mereka menjadi kunci bagi kandidat yang ingin mengamankan posisi strategis dalam kompetisi tersebut. Siapa pun yang mampu menarik perhatian kelompok ini dapat meraih keuntungan besar, sementara kurangnya dukungan dari mereka bisa berakibat merugikan bagi target suara yang ingin dicapai. Partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi hal yang sangat penting, karena hal ini berpengaruh langsung kepada legitimasi pemerintahan yang terpilih. Jika pemilu hanya diikuti oleh separuh jumlah pemilih, maka suara yang diperoleh tidak mencerminkan kehendak seluruh rakyat, dan setiap pilihan politik tidak akan seragam. Legitimasi adalah syarat mutlak yang secara politik menentukan kekuatan ataupun kelemahan suatu pemerintahan, (Journal et al., 2022).

2.3 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti tentunya perlu mempertimbangkan dan membandingkan dengan penelitian-penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pendidikan politik bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang merupakan pemilih pemula menjadi sorotan dalam berbagai penelitian, yang menekankan pentingnya pembekalan awal mengenai pemahaman politik. Hal ini bertujuan agar generasi muda dapat berperan aktif dalam proses demokrasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan politik di tingkat SMA memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kesadaran politik serta partisipasi pemilih muda dalam pemilu. Sebuah studi yang dilakukan oleh Mulyana (2017) mengungkapkan bahwa pendidikan politik mampu membentuk

pola pikir siswa menjadi lebih kritis terhadap isu-isu politik dan memahami dampak dari keputusan politik yang diambil terhadap kehidupan mereka.

Pendidikan politik yang diterapkan di sekolah biasanya menggunakan metode interaktif, seperti diskusi, debat, simulasi pemilu, dan pemanfaatan media sosial untuk menganalisis isu-isu politik terkini. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2019) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pengalaman ini efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Fitriani (2021) menemukan bahwa siswa yang mendapatkan pendidikan politik yang baik cenderung lebih percaya diri dalam pengambilan keputusan politik dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak valid.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan politik di tingkat SMA memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk karakter pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Mengingat pemilih pemula memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah politik negara di masa depan, memberikan pendidikan politik yang tepat sejak dini menjadi fondasi yang kokoh untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas.

3. Metodologi penelitian

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan gejala, fakta, atau peristiwa dengan cara yang sistematis dan akurat, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai sifat-sifat populasi yang diteliti. Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak perlu mencari hubungan atau menguji hipotesis. Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gejala, fakta, dan kejadian secara sistematis dan akurat, serta menganalisis kebenarannya. Proses ini dilakukan melalui pedoman wawancara dan observasi, sehingga hasil yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Agar menjadi instrumen penelitian yang efektif, penulis

mengacu pada panduan Boorg dan Gall (1983) yang dikutip dalam karya Sugiyono. Dalam hal ini, peneliti diharuskan memiliki wawasan yang luas, baik mengenai topik yang diteliti maupun pengetahuan umum yang relevan.

3.2 Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di SMAN 1 Balauring Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata pada tanggal 28 Maret Tahun 2024. Pemilihan Sekolah ini dengan pertimbangan lokasi penelitian ini sangat mudah dijangkau.

3.3 Subjek Penelitian

Peneliti akan melibatkan berbagai pihak dengan menggunakan informan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang berarti bahwa penentuan informan tidak didasarkan pada strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah, melainkan pada tujuan tertentu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, informan kunci terdiri dari 16 orang yang terdiri atas 10 siswa dan 6 guru di SMAN 1 Balauring.

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan data atau informasi serta keterangan yang dibutuhkan, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan terhadap berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di Sekolah SMAN 1 Balauring, khususnya yang berkaitan dengan objek penelitian mengenai pendidikan politik. Berikut ini adalah kisi-kisi panduan observasi yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 3.4. 1 Panduan Observasi

No	Aspek
1	Sekolah memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah dengan cara mengeliminasi elemen-elemen yang tidak diperlukan
2	Sekolah dapat mengembangkan pola atau model secara umum dari persamaan maupun ketidaksamaan yang muncul dari masalah yang dihadapi, kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan

	menggunakan metode penyelesaian yang sesuai dengan jenis persoalan yang sama.
3	Sekolah dapat dengan baik mengidentifikasi dan menjelaskan masalah yang lebih sederhana
4	Sekolah memiliki kemampuan untuk secara logis menyusun tahapan yang diperlukan dalam merancang sebuah solusi untuk mengatasi masalah
5	Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam proses pemecahan masalah dan melakukan perbaikan yang diperlukan

b. Teknik wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan lisan kepada informan secara bebas, namun tetap terarah. Meskipun wawancara mengacu pada pedoman yang telah disusun sebelumnya, tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan tambahan yang dapat mendukung validitas data yang diperoleh.

Tabel. 3.4. 2 Pedoman Wawancara Untuk Pemilu Pemula

Langkah	Penjelasan
1. Pengenalan tentang Pemilu	Pemilu merupakan proses di mana para warga negara memberikan suaranya untuk memilih wakil-wakil mereka, baik untuk posisi eksekutif seperti presiden maupun untuk keanggotaan legislatif. Penting untuk menginformasikan kepada siswa bahwa pemilu memiliki peranan krusial, karena melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menentukan pemimpin yang akan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan politik dan sosial yang akan memengaruhi negara kita.
2. Pentingnya Pemilu	Pemilu memiliki peranan yang sangat penting, karena memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang dapat mewakili kepentingan mereka. Proses pemilu ini menjadi jaminan untuk keberlanjutan sistem demokrasi dalam sebuah negara. Dengan adanya pemilu, suara rakyat dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan menuju kondisi yang lebih baik.
3. Syarat Pemilih	Di Indonesia, seorang pemilih adalah warga negara yang telah mencapai usia 17 tahun dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Penting bagi siswa untuk memahami bahwa hanya mereka yang memenuhi syarat usia dan telah terdaftar yang dapat turut serta dalam pemungutan suara.
4. Perasaan tentang Menjadi	Sebagai pemilih pemula, sangat penting bagi siswa untuk merasa percaya diri dan siap dalam menghadapi pemilu. Mereka perlu diberi pemahaman bahwa berpartisipasi dalam pemilu adalah hak

Langkah	Penjelasan
Pemilih	sekaligus tanggung jawab mereka untuk ikut menentukan arah masa depan negara melalui pilihan yang mereka buat.
5. Persiapan Sebelum Memilih	Sebelum menggunakan hak suaranya, siswa perlu memahami dengan baik para calon yang akan dipilih, baik calon presiden, gubernur, maupun anggota legislatif. Penting bagi mereka untuk mencari informasi tentang visi, misi, dan rekam jejak calon-calon tersebut agar dapat membuat pilihan yang tepat.
6. Prosedur Memilih	Para siswa perlu memahami cara penggunaan surat suara yang benar agar suara mereka dapat diterima. Proses pemungutan suara dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS), di mana pemilih akan mencoblos surat suara sesuai pilihan mereka. Penting untuk menjelaskan tata cara ini secara jelas agar siswa dapat melakukannya dengan tepat saat hari pemilu tiba.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan metode kepustakaan, yang mencakup laporan, dokumen, catatan, arsip, dan monografi. Semua sumber ini berperan penting dalam mendukung pengumpulan data secara menyeluruh sesuai dengan objek yang diteliti.

3.5 Teknik pengolahan dan analisa data

Analisis data adalah proses yang melibatkan pengaturan urutan data serta pengorganisasian ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mencakup analisis berdasarkan waktu, ruang, dan perbedaan individu antar peneliti. Pendekatan ini melibatkan sejumlah peneliti dalam pengumpulan dan analisis data, serta memanfaatkan berbagai perspektif teori untuk memperkaya wawasan penelitian.

Teknik analisis ini didasarkan pada kemampuan nalar untuk mengaitkan fakta, data, dan informasi, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis dan menghasilkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menyajikan hasil wawancara dan menganalisis masalah yang telah ditentukan di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang objek yang diteliti dan memungkinkan penarikan kesimpulan yang tepat.

1.6 Uji keabsahan data

Untuk menguji validitas data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara triangulasi agar data yang dihasilkan merupakan data yang valid untuk penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber yang lain. Menganalisis sumber yang sama dengan waktu dan teknik yang berbeda.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan memaparkan tentang bagaimana implementasi pendidikan politik bagi Sekolah SMAN 1 Balauring sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum maupun pilkada di Kabupaten Lembata serta pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam menghadapi pemilihan umum dan pilkada di Kabupaten lembata. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan cara pengumpulan data berupa wawancara terhadap enam belas partisipan di Sekolah SMAN 1 Balauring.

Data dalam penelitian ini data yang dikumpulkan menggunakan data kualitatif. Peneliti memperoleh data yang bersumber hasil dari observasi dan wawancara terkait implementasi pendidikan politik bagi Sekolah SMAN 1 Balauring sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum atau pilkada di Kabupaten Lembata serta pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam menghadapi pemilihan umum dan pilkada di Kabupaten lembata. Wawancara dilakukan semi terstruktur kepada kepala sekolah, guru dan siswa. Sumber data yang diperoleh sebagai bukti pada waktu pelaksanaan menggunakan dokumentasi. Subjek pada penelitian ini siswa kelas XI dan kelas XII SMAN 1 terdiri dari siswa dan guru dengan kemampuan yang berbeda-beda.

4.1.1 Mengkaji bentuk pendidikan politik yang dilakukan Sekolah dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkat partisipasi aktif bagi siswa SMA sebagai pemilih pemula

Penelitian tahap awal dilaksanakan pada Senin, 27 Maret 2024, dengan mengunjungi kepala sekolah SMAN 1 Balauring untuk meminta izin melakukan penelitian dan melakukan wawancara langsung tentang bentuk pendidikan politik yang diterapkan di sekolah tersebut, terutama di kelas XI dan XII.

Hasil wawancara bersama guru dan kepala sekolah SMAN 1 Balauring menerangkan tentang bentuk pendidikan politik bagi siswa siswi di kelas XI dan XII SMAN 1 Balauring yaitu:

“Bentuk pembelajaran pendidikan politik di kelas XI dan XII yaitu melalui mata pelajaran PPKn, siswa tidak hanya sekedar belajar secara teoritis politik di kelas. Tetapi siswa diberikan ruang untuk melakukan praktek atau simulasi secara langsung. Melalui kegiatan program yang disediakan oleh kesiswaan yang ada di sekolah yaitu kegiatan intra sekola maupun kegiatan ekstrakurikuler.”

Hasil wawancara menunjuka bahwa melalui mata pelajaran PPKn guru sering menerapkan materi bentuk pendidikan politik agar lebih relevan dan menarik bagi siswa di sekolah SMAN 1 balauring. PPKn dianggap sebagai sarana penting dalam memperkenalkan konsep dasar politik. Pembinaan OSIS yang diselenggarakan oleh pihak kesiswaan merupakan wujud nyata dari upaya sekolah dalam memberikan pendidikan politik kepada para siswanya. Materi yang diajarkan mencakup pemahaman mengenai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta struktur lembaga pemerintahan. Melalui pembinaan ini, anggota OSIS akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman berharga mengenai kepemimpinan serta cara menjalankan roda organisasi dengan baik.

Tahap berikutnya observasi yang dilakukan di kelas XI dan XII SMAN 1 Balauring pada hari Kamis, 2 April 2024 dilaksanakan di dalam kelas. Observasi bertujuan untuk mengeksplorasi upaya pendidikan politik yang dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa SMA sebagai pemilih pemula. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, maupun wawancara yang dilakukan

didapat data maupun keterangan mengenai bentuk-bentuk pendidikan politik di sekolah antara lain sebagai berikut:

1. Pembelajaran PPKn

Pendidikan politik bagi siswa di sekolah dapat dilakukan melalui pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran politik siswa. Berdasarkan tujuannya, PPKn, yang sering disebut sebagai pendidikan kewarganegaraan, memiliki fungsi dan peran penting sebagai pendidikan politik. Dalam kurikulum PPKn, terdapat berbagai materi politik yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Melalui penyampaian materi politik ini, diharapkan siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang informasi politik yang akurat, termasuk kemampuan untuk mengenali berita hoaks. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan kesadaran politik mereka dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, baik di lingkungan sekolah maupun dalam konteks yang lebih luas, seperti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di sekolah, pendidikan politik utamanya disampaikan oleh guru melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta melalui program-program kegiatan lainnya. Dalam pelajaran PPKn, terdapat berbagai materi yang mencerminkan pelaksanaan pendidikan politik. Di tingkat SMA, khususnya di Kelas X, siswa mempelajari hakikat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, juga diajarkan tentang pentingnya menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, serta sistem politik yang berlaku di Indonesia.

Di Kelas XI, siswa mempelajari materi tentang budaya politik di Indonesia, sementara di Kelas XII, mereka akan mendalami berbagai sistem pemerintahan. Kehadiran materi politik dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting untuk memperluas wawasan siswa mengenai dunia politik. Untuk mencapai hasil maksimal dalam pembelajaran PPKn, para guru senantiasa mengacu pada sumber belajar yang relevan dan selalu

memperbarui informasi sesuai dengan kondisi dan isu terkini. Diharapkan bahwa dengan adanya sumber belajar ini, siswa akan lebih mudah memahami dan menguasai materi politik, terutama dengan menghadirkan informasi yang aktual dan relevan dengan konteks saat ini. Selain itu, upaya untuk memaksimalkan pembelajaran politik tidak hanya bertumpu pada pemanfaatan sumber belajar.

Dalam proses pengajaran, guru juga menerapkan metode dan model pembelajaran yang menyenangkan serta mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif. Proses pembelajaran politik untuk siswa SMA dapat dirancang dengan pendekatan yang beragam dan kontekstual, agar mereka dapat terlibat secara aktif dan memahami materi dengan baik. Beberapa bentuk pembelajaran politik yang dapat diterapkan disekolah adalah pembelajaran secara teoritis di kelas melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Simulasi dan Praktik Langsung seperti pemilihan ketua osis, Sosialisasi dari Lembaga Eksternal (Komisi Pemilihan Umum), pemanfaatan media digital dan teknologi, serta Pembelajaran Kontekstual dan Proyek.

Penggunaan metode dan model pembelajaran dirancang dengan tujuan untuk menarik minat siswa terhadap pelajaran serta mendorong partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, guru telah merancang bentuk pembelajaran yang tidak hanya terbatas di dalam kelas, tetapi juga mencakup kegiatan di luar kelas untuk mendukung pembelajaran PPKn. Melalui pembelajaran di luar kelas, siswa memiliki kesempatan untuk menerapkan langsung teori yang telah mereka pelajari sebelumnya. Salah satu cara yang efektif adalah melalui simulasi, yang memungkinkan siswa untuk lebih memahami dan menguasai materi yang diajarkan.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, termasuk guru dan siswa, PPKN dianggap sebagai sarana penting dalam memperkenalkan konsep dasar politik. Materi yang diajarkan mencakup pemahaman mengenai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta struktur lembaga pemerintahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak siswa merasa materi PPKN sangat relevan untuk memahami isu-isu sosial di lingkungan mereka. Para guru juga menekankan pentingnya mengaitkan pembelajaran dengan kejadian politik terkini

untuk meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran ini. Para narasumber sepakat bahwa pendidikan politik melalui PPKn bertujuan untuk mencetak siswa yang memiliki pemikiran kritis terhadap isu-isu sosial dan politik. Para guru seringkali mendorong diskusi mengenai tema-tema penting seperti keadilan sosial, korupsi, dan hak asasi manusia. Hasil wawancara dengan guru-guru menunjukkan bahwa metode pembelajaran, seperti simulasi pemilu dan debat, terbukti efektif dalam meningkatkan minat siswa.

Hasil wawancara dengan guru kelas XII SMN 1 Balauring yang mendukung hasil observasi yaitu:

“Guru menerapkan berbagai metode pembelajaran, namun yang paling sering digunakan adalah melalui pelajaran PPKn dengan memanfaatkan media konkret yang ada di sekitar lingkungan siswa. Fokus utamanya adalah pada pemahaman tentang demokrasi dan kepemimpinan”

Berdasarkan wawancara dengan guru, bahwa pendidikan politik melalui pelajaran PPKn. Proses pembelajaran ini melibatkan observasi langsung, rekaman aktivitas, dan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh guru. Dalam fase ini, guru sering menerapkan beragam pendekatan untuk menyampaikan materi pendidikan politik, agar lebih relevan dan menarik bagi siswa. Salah satu metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, di mana guru menjelaskan konsep-konsep dasar seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan struktur pemerintahan, sambil melibatkan siswa dalam sesi tanya jawab. Selanjutnya, guru mengatur diskusi kelompok di mana siswa dapat berdiskusi mengenai isu-isu politik seperti keadilan sosial, peran lembaga legislatif, dan partisipasi warga negara.

2. Program Kesiswaan

Pelaksanaan pendidikan politik di sekolah tidak hanya terbatas pada mata pelajaran PPKn, tetapi juga melibatkan berbagai program yang disiapkan oleh bagian kesiswaan. Di antara program-program kesiswaan yang ada di sekolah, terdapat program pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler, pelaksanaan satuan tugas kesiswaan, serta penegakan tata tertib dan disiplin. Selain itu, program sosialisasi dan pembinaan untuk OSIS juga menjadi bagian penting dalam upaya ini. Di antara semua program tersebut, yang paling

erat kaitannya dengan pendidikan politik adalah pembinaan OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler.

Program pembinaan OSIS yang diselenggarakan oleh pihak kesiswaan merupakan wujud nyata dari upaya sekolah dalam memberikan pendidikan politik kepada para siswanya. Melalui pembinaan ini, anggota OSIS akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman berharga mengenai kepemimpinan serta cara menjalankan roda organisasi dengan baik. Organisasi OSIS akan memberikan siswa kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan politik di lingkungan sekolah. Dalam program OSIS, terdapat beberapa elemen penting yang mendukung proses pendidikan politik, antara lain pemilihan OSIS yang dilaksanakan secara langsung oleh seluruh warga sekolah setiap tahun dan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan bagi para calon pengurus OSIS. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam wawancara berikut:

“Program kesiswaan merupakan upaya nyata dari sekolah untuk menghubungkan teori politik yang diajarkan dalam pelajaran PPKN dengan praktik sehari-hari. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pemimpin masa depan, tetapi juga untuk menghasilkan warga negara yang aktif”

Berdasarkan pernyataan di atas, program kesiswaan menyediakan ruang praktik nyata bagi siswa untuk memahami dan menerapkan teori politik yang telah dipelajari dalam mata pelajaran PPKN. Kegiatan ini tidak hanya memperdalam pemahaman konsep, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang esensial untuk kehidupan sosial dan politik mereka di masa depan. Dengan demikian, program kesiswaan berperan penting dalam mendidik pemimpin masa depan sekaligus mencetak generasi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

Kegiatan simulasi pemilihan ketua OSIS, sebuah momen penting dalam kehidupan sekolah. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memilih pemimpin organisasi siswa, tetapi juga merupakan sarana pembelajaran tentang demokrasi yang berarti. Simulasi ini melibatkan seluruh anggota sekolah, mulai dari guru hingga siswa, dalam proses yang mencerminkan mekanisme pemilihan umum. Hasil wawancara dengan guru kelas XII SMAN 1 Balauring yang mendukung hasil observasi yaitu:

“Guru telah berusaha untuk menjelaskan teori sekaligus melakukan simulasi, dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman siswa dan meningkatkan minat mereka terhadap pendidikan politik. Agar siswa siap menghadapi tantangan ini, mereka perlu diberikan bekal yang memadai dalam proses berpikir dan kemampuan menganalisis secara komprehensif. Dengan cara ini, diharapkan mereka dapat meningkatkan partisipasi sebagai pemilih pemula dalam kontestasi pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah”

Pendidikan politik melalui program kesiswaan adalah langkah strategis yang bertujuan untuk memperlengkapi siswa, terutama para pemilih pemula, dengan pemahaman mendalam tentang peran mereka dalam sistem demokrasi. Berbagai kegiatan kesiswaan, seperti pemilihan ketua OSIS, simulasi pemilu, dan aktivitas organisasi siswa, menciptakan lingkungan yang ideal untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi, memahami proses pengambilan keputusan secara kolektif, serta meningkatkan kesadaran siswa akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Di samping itu, program kesiswaan yang memanfaatkan media sosial sebagai platform edukasi, seperti kampanye "Pemilih Pemula Cerdas," mendorong siswa untuk menyebarkan informasi positif dan melawan disinformasi. Ini tidak hanya meningkatkan literasi digital mereka tetapi juga membangun kesadaran politik yang lebih besar. Dengan menguatkan nilai-nilai demokrasi dan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, program kesiswaan berfungsi sebagai alat yang efektif dalam membentuk generasi muda yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab.

3. Ekstrakurikuler

Ekstrakurikuler merujuk pada kegiatan tambahan yang diikuti siswa setelah jam pelajaran utama berakhir, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sana. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan siswa di luar ranah akademik. Sebagai sarana pembelajaran nonformal, ekstrakurikuler juga berperan dalam pembentukan karakter, termasuk aspek kepemimpinan, kerja sama, dan disiplin. Selain itu, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperluas jaringan sosial serta meningkatkan rasa percaya diri saat berinteraksi dengan teman sebaya dan lingkungan sekitar.

Ekstrakurikuler berperan penting dalam memberikan pendidikan politik kepada siswa, melalui kegiatan seperti pramuka, paskibra, dan PMR. Selain itu, pendidikan politik di sekolah dapat berlangsung dengan berbagai cara, seperti mengorganisir kegiatan yang memberikan informasi politik secara langsung, misalnya melalui penyuluhan atau sosialisasi yang melibatkan praktisi politik dan pembicara ahli di bidangnya. Cara lain yang dapat diterapkan adalah dengan menampilkan informasi politik, seperti artikel dari surat kabar atau majalah, yang dipasang di papan pengumuman atau majalah dinding sekolah. Hal ini diungkapkan oleh guru selama wawancara berikut:

“Kegiatan ekstrakurikuler debat memberikan siswa kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai berbagai isu politik yang tengah berkembang. Selain itu, siswa dilatih untuk menganalisis berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan. Melalui proses ini, mereka juga belajar tentang sistem politik, regulasi pemerintahan, serta pentingnya partisipasi aktif dalam masyarakat”

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan pendidikan politik yang dilakukan di sekolah oleh Komisi Pemilihan Umum. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendorong partisipasi politik siswa dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. Selain itu, pendidikan politik juga mengutamakan keberanian siswa untuk menentukan pendirian mereka secara mandiri. Ini sangat penting untuk membimbing siswa dalam memahami arah kebijakan politik, terutama di tengah berbagai konflik yang muncul akibat perbedaan

kepentingan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar sangat diperlukan untuk menumbuhkan partisipasi di kalangan pemilih pemula.

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran yang penting bagi generasi muda, khususnya pemilih pemula, dalam menghadapi berbagai kegiatan demokratis seperti Pemilihan Umum dan pemilihan kepala daerah. Melalui pembelajaran ini, diharapkan setiap individu dapat mengetahui dan memahami perannya, sehingga mereka memiliki kesadaran penuh untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan aktif berpartisipasi dalam politik, terutama dengan menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum.

4.1.2 Menganalisa peran Sekolah dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan siswa SMA sebagai pemilih pemula di Kabupaten Lembata

Sekolah memainkan peran strategis dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran siswa SMA sebagai pemilih pemula. Berikut ini adalah beberapa langkah penting yang dapat diambil oleh sekolah: mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam kurikulum. Melalui mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sekolah dapat menyampaikan materi-materi politik yang mencakup prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam pemilu.

Hasil wawancara dengan guru kelas XII SMAN 1 Balauring yang mendukung hasil observasi yaitu:

“Sekolah memiliki peran penting dalam mendorong siswa menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Dengan mengajarkan nilai-nilai demokrasi, seperti menghargai perbedaan pendapat dan menjunjung tinggi etika dalam berpolitik, siswa dapat merasakan langsung makna keterlibatan politik. Pengalaman ini membantu mereka memahami betapa pentingnya partisipasi aktif dalam menciptakan perubahan yang positif di Masyarakat”

Sekolah berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan memberikan pengetahuan kepada anak-anak agar mereka bisa berkontribusi positif untuk bangsa dan negara. Selain itu, sekolah juga berperan dalam membentuk,

memperbaiki, dan memperhalus perilaku siswa. Dengan demikian, sekolah mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

Peneliti menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa mengenai pemilih pemula. Data diperoleh dari wawancara dengan 16 orang, yang terdiri atas 10 siswa dan 6 guru. Dari hasil wawancara tersebut, ditemukan bahwa 4 siswa sudah memahami peran mereka sebagai pemilih pemula dalam meningkatkan partisipasi politik melalui pendidikan politik. Namun, 6 siswa lainnya masih belum sepenuhnya mengerti peran mereka dalam konteks tersebut.

Pembelajaran berbasis diskusi interaktif mengenai isu-isu politik dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang peran mereka dalam demokrasi. Sebelum guru menyampaikan materi terkait pemilihan umum, peserta diberikan beberapa pertanyaan untuk mengevaluasi pemahaman mereka tentang konsep pemilu. Kegiatan ini dilakukan melalui metode ceramah dan tanya jawab, yang memungkinkan terjalinnya interaksi antara pemateri dan siswa. Jawaban siswa mengenai makna pemilu bervariasi.

Beberapa mengartikan pemilu sebagai kegiatan kampanye dan distribusi sembako, sementara yang lain melihatnya sebagai perebutan kekuasaan. Ada pula yang mendefinisikan pemilu sebagai proses pemilihan presiden, gubernur, bupati, serta anggota DPR dan DPRD. Dengan kegiatan ini, pendidikan politik bagi siswa, khususnya bagi pemilih pemula, sangat penting untuk memberi mereka pemahaman tentang peran serta pentingnya berpartisipasi dalam proses pemilu demi mendukung pembangunan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Bentuk Pendidikan Politik bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai pemilih pemula

Pemilih pemula, terutama di kalangan siswa SMA, memainkan peran yang sangat strategis dalam pembangunan demokrasi. Keterlibatan generasi muda dalam proses pemilihan umum menjadi kunci yang menentukan arah perkembangan demokrasi dan kemajuan bangsa, (Journal et al., 2022). Hal yang sama juga disampaikan oleh (Noprianto et al., 2023) menyatakan bahwa sebagai

generasi muda yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Pendidikan politik menjadi sangat krusial untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan berdemokrasi. Pemilih, dalam hal ini, merupakan pihak yang menjadi fokus utama bagi para kontestan, yang berusaha mempengaruhi keyakinan mereka agar mendukung dan memberikan suara kepada kandidat yang bersangkutan, (Rahman, 2017)

Pendidikan melalui Kurikulum Sekolah Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman siswa mengenai nilai-nilai dasar demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya keterlibatan dalam politik. Melalui pembelajaran PPKn, siswa diajarkan tentang prinsip-prinsip demokrasi, proses pemilihan umum, dan peran pemilih, serta hak dan tanggung jawab yang dimiliki ketika memberikan suara. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh (Hamid, 2024) yang menyebutkan Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang penting.

Tujuan dari pendidikan ini adalah agar mereka dapat menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab. Dengan bekal tersebut, diharapkan para peserta didik mampu menghadapi permasalahan nasional serta berbagai tantangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan melalui ekstrakurikuler dan organisasi, seperti OSIS dan klub debat, memberikan para siswa kesempatan untuk terlibat dalam diskusi mengenai isu-isu politik, berorganisasi, serta melatih kemampuan dalam membuat keputusan secara kolektif. OSIS, khususnya, berfungsi sebagai wadah bagi siswa untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, (Alwi, 2023). Kegiatan ini tidak hanya melatih keterampilan kepemimpinan dan pengambilan keputusan, tetapi juga mengajak siswa untuk terlibat dalam Bakti Sosial atau Pengabdian Masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, siswa dapat melihat secara langsung berbagai masalah sosial-politik yang dihadapi masyarakat. Pengalaman ini

diharapkan dapat menumbuhkan empati dan rasa tanggung jawab mereka sebagai warga negara.

Untuk menjalankan dan mengoptimalkan proses pendidikan politik, sangat penting untuk memiliki strategi yang tepat serta tempat yang sesuai untuk pelaksanaannya. Salah satu tempat yang dapat digunakan sebagai sarana untuk pendidikan politik adalah sekolah. Sekolah berfungsi sebagai ruang belajar yang bertujuan agar siswa menjadi individu yang melek politik. Melalui pendidikan politik di sekolah, diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi warga negara yang baik dan cerdas, menyadari hak, kewajiban, tanggung jawab, dan posisi politik mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (Riau & Sorong, 2023). Pengetahuan tentang pendidikan politik berkaitan dengan konsep dimana individu dapat memahami, mengembangkan sikap, dan mengadopsi nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem politik dalam masyarakat, terutama di tingkat negara. Untuk mencapai tujuan ini, kerjasama antara berbagai pihak sangat diperlukan, agar sekolah dapat berfungsi sebagai laboratorium pendidikan politik. Sekolah, sebagai lembaga pendidikan formal, memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan politik. Di dalam lingkungan sekolah, pendidikan politik dapat diperoleh melalui pembelajaran formal di kelas, yang meliputi teori-teori yang diajarkan oleh guru, serta melalui praktik langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks pembelajaran formal, sekolah berperan penting dalam memfasilitasi pendidikan politik melalui penyusunan kurikulum. Meskipun tidak ada mata pelajaran khusus yang secara langsung disebut sebagai pendidikan politik, konsep tersebut terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pelajaran ini menjadi sarana alternatif untuk menyampaikan pendidikan politik di lingkungan sekolah. Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi politik siswa SMA dengan memberikan informasi terkait politik, demokrasi, serta hak-hak warga negara, (Society & Miqdad, 2024). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah mata pelajaran yang dirancang untuk mengajarkan cara menjadi warga negara yang baik. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk individu yang cerdas,

terampil, dan berkarakter, serta mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku., (Syarifah et al., 2022).

Untuk menciptakan pelaksanaan pendidikan politik yang kondusif, peran sekolah sangatlah krusial. Namun, peran ini juga memerlukan dukungan dari seluruh elemen dan warga sekolah. Selain mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam kurikulum, baik melalui desain khusus dalam mata pelajaran PPKn maupun dalam mata pelajaran lain, sekolah dapat memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendukung pendidikan politik. Kegiatan tersebut meliputi Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) serta kegiatan ekstrakurikuler seperti paskibra, pramuka, dan PMR, (Gobel et al., 2021). OSIS, sebagai salah satu organisasi siswa di sekolah, berperan penting dalam membentuk sikap demokratis di kalangan para siswa, (Shalihudin & Hermanto, 2021)

Melalui bidang kesiswaan, setiap sekolah memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan pendidikan politik. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan berperan sebagai pendamping dan penanggung jawab bagi Kepala Sekolah dalam pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Pembinaan ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penilaian dan pengembangan, serta pemberian berbagai bentuk bantuan yang dilakukan oleh pembina OSIS atau pihak sekolah, (Tâm et al., 2016). Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk meningkatkan peran serta dan inisiatif siswa dalam menjaga dan merawat sekolah sebagai wiyatamandala. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat terhindar dari pengaruh dan usaha yang bertentangan dengan kebudayaan nasional. Selain itu, pembinaan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa terhadap pengaruh negatif, baik yang berasal dari luar maupun dari lingkungan sekolah itu sendiri. Pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni, membentuk sikap cinta kepada bangsa dan negara, serta meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai Pancasila. Tak kalah penting, pembinaan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani siswa.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 226/C/Kep/0/1993, dinyatakan bahwa organisasi kesiswaan di sekolah dikenal sebagai OSIS. OSIS merupakan singkatan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah. Secara umum, organisasi bisa diartikan sebagai kelompok kerja yang dibentuk oleh individu-individu dengan tujuan untuk mencapai sasaran bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, organisasi merujuk pada kelompok kerjasama di antara siswa, yang dibentuk untuk mendukung tercapainya tujuan bersama dalam pembinaan kesiswaan.

OSIS merupakan wadah bagi siswa untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, OSIS dapat dipahami sebagai suatu sistem, di mana sekumpulan siswa melakukan koordinasi untuk membentuk sebuah organisasi yang efektif dalam meraih tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, OSIS sebagai sistem memiliki beberapa ciri utama: adanya tujuan bersama, struktur kehidupan kelompok, pembagian peran yang jelas, serta koordinasi yang berkesinambungan dalam periode tertentu. Salah satu ciri penting dari setiap organisasi adalah adanya beragam fungsi dan peran. Dalam hal ini, OSIS memiliki beberapa peranan yang krusial untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai salah satu saluran pembinaan kesiswaan, OSIS berfungsi sebagai platform bagi kegiatan siswa di sekolah, berkolaborasi dengan bentuk pembinaan lainnya untuk mendukung tujuan pengembangan kesiswaan. Selain itu, OSIS juga berperan sebagai motivator, yang mampu menumbuhkan semangat dan keinginan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan guna mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, OSIS berfungsi sebagai organisasi yang memfasilitasi siswa dalam bekerja sama untuk meraih cita-cita yang telah ditetapkan, sesuai dengan konsep organisasi sebagai kumpulan individu yang berkolaborasi, (Bima Sakti et al., 2024).

Dengan demikian, secara proaktif, OSIS telah berhasil menjaga keamanan sekolah dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar. Salah satu cara untuk membina karakter siswa adalah melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS, (Smk et al., n.d.). Melalui peran OSIS, terdapat sejumlah manfaat yang dapat diperoleh, antara lain: meningkatkan nilai-nilai

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengembangkan kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Selain itu, OSIS juga berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan organisasi, pendidikan politik, dan kepemimpinan, serta mengasah keterampilan, kemandirian, dan spiritualitas. Di samping pembinaan melalui OSIS, kegiatan kesiswaan juga dapat mengimplementasikan program pendidikan politik melalui ekstrakurikuler.

Kegiatan ekstrakurikuler diadakan di luar jam pelajaran reguler atau saat libur sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Tujuannya adalah untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa mengenai hubungan antar beragam mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembangunan manusia yang utuh.(Andriana & Hidir, 2024). Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra, dan PMR dapat menjadi sarana efektif bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan politik. Tujuan dari pendidikan politik dalam organisasi ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif di kalangan siswa. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif, menumbuhkan semangat dalam berbuat, serta bersama-sama mencapai tujuan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan demikian, siswa tidak hanya diajarkan untuk berperan, tetapi juga dipupuk rasa keinginan untuk berkontribusi dan berinovasi (Hindun et al., 2021).

Pendidikan politik di sekolah dapat dilaksanakan melalui berbagai cara yang efektif. Salah satunya adalah mengadakan kegiatan yang secara langsung memberikan informasi politik kepada siswa, seperti penyuluhan atau sosialisasi yang melibatkan praktisi politik dan para ahli di bidangnya. Selain itu, pendidikan politik juga dapat dilakukan dengan menempelkan informasi politik, seperti artikel dari surat kabar atau majalah, pada papan pengumuman sekolah atau dalam majalah dinding. Di samping peran sekolah secara keseluruhan, keterlibatan guru juga sangat penting dalam proses pendidikan politik ini.

Guru adalah komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran, memiliki tanggung jawab besar, dan berperan krusial dalam mencapai keberhasilan pendidikan, (Politik et al., 2024). Peran guru dalam proses

pendidikan politik sangatlah krusial. Sebagai tenaga pendidik, mereka tidak hanya menyampaikan nilai-nilai dan pandangan tentang pendidikan politik, tetapi juga berperan sebagai kreator dan manipulatif budaya belajar. Hal ini dikarenakan kebiasaan belajar siswa di kelas sering kali berdampak pada dinamika politik di masyarakat. Dalam konteks pembelajaran pendidikan politik, peran guru, terutama guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), menjadi semakin penting. Mereka dituntut untuk mengajarkan siswa tentang pendidikan politik, baik selama proses pembelajaran di kelas maupun di luar lingkungan sekolah. Dengan pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas, keterampilan demokrasi siswa dapat ditingkatkan. Pendekatan ini dapat mencakup pelatihan, simulasi, diskusi, serta pengalaman praktis yang memungkinkan siswa untuk menerapkan keterampilan demokrasi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari (Syarifah et al., 2022).

4.2.2 Peran Sekolah dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan siswa SMA sebagai pemilih pemula di Kabupaten Lembata

Sekolah memegang peranan penting dalam membentuk siswa SMA menjadi pemilih pemula yang cerdas dan bertanggung jawab. Salah satu cara untuk mengintegrasikan pendidikan politik dalam kurikulum formal adalah melalui pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Melalui pelajaran ini, siswa mendapatkan dasar teori tentang demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mekanisme pemilu. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai pendidikan politik, tetapi juga bertujuan untuk membantu siswa menjadi warga negara yang berpolitik matang dan berkontribusi dalam membangun sistem politik yang demokratis (Hamid, 2024). Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya mempelajari konsep demokrasi dari segi akademis, tetapi juga dilatih untuk menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. (Susanti, 2020).

Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar memahami konsep-konsep, tetapi juga dapat terlibat dalam pembelajaran di luar kelas. Sekolah juga dapat mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, seperti simulasi pemilu dan debat politik, yang mendukung pembelajaran formal. Misalnya, simulasi pemilu

memungkinkan siswa untuk merasakan langsung proses teknis dan nilai-nilai demokrasi. Kegiatan ini memberikan pengalaman praktis yang memperdalam kesadaran mereka akan pentingnya partisipasi politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahman 2021) yang menunjukkan bahwa kegiatan berbasis simulasi dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam memahami proses politik.

Kerjasama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan organisasi masyarakat sipil, merupakan langkah penting yang perlu diambil. Di samping itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan dan penyelenggara pemilu dalam program pendidikan politik juga berperan dalam memperkaya pemahaman kognitif pemilih pemula mengenai politik dan proses pemilu (Sutarna et al., 2023). Sekolah dapat mengundang perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan penyuluhan mengenai tata cara pemilu yang jujur dan adil. Inisiatif ini sejalan dengan misi KPU, yaitu meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum, demi mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis (Ma et al., 2019).

Literasi digital harus menjadi perhatian utama dalam pendidikan politik di sekolah. Dengan maraknya informasi politik yang beredar di media sosial, penting bagi siswa untuk dilengkapi kemampuan dalam memilih informasi yang valid dan menghindari hoaks. Teknologi digital menawarkan berbagai potensi untuk meningkatkan pendidikan politik, yang dapat mengubah cara siswa belajar, memahami, dan terlibat dalam proses politik (Tamrin et al., 2024). Literasi ini berperan penting dalam membantu calon pemilih menjadi lebih kritis dan terinformasi. Sebuah studi yang dilakukan oleh Febrianti pada tahun 2022 menyatakan bahwa penguatan literasi digital di kalangan pemilih pemula dapat mencegah mereka dari pengaruh kampanye negatif dan manipulasi.

Dengan peran aktif yang dijalankan oleh sekolah melalui berbagai metode, siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman tentang demokrasi, tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk berkontribusi secara aktif dalam menciptakan sistem politik yang sehat dan inklusif. Dengan demikian, munculnya kesadaran politik di kalangan mereka adalah cerminan dari hati nurani setiap individu yang

memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, yang mencakup aspek politik, ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan (Siregar, 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pendidikan politik untuk siswa SMA sebagai pemilih pemula di SMAN 1 Balauring, yang mencakup penyajian, analisis data, dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

Bentuk pendidikan politik yang dilakukan sekolah terhadap siswa SMA sebagai pemilih pemula yakni pertama, pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah pelajaran yang mengajarkan dasar-dasar politik, demokrasi, serta hak dan kewajiban warga negara, termasuk pemahaman mengenai proses pemilihan umum. Melalui mata pelajaran PKn yang diajarkan di sekolah, serta pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin, siswa diajak untuk mengembangkan rasa nasionalisme dan disiplin dalam diri mereka. Kedua, Simulasi Pemilu: Kegiatan praktik yang meniru proses pemilihan umum, seperti pemilihan ketua OSIS di sekolah, bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung mengenai tata cara pemungutan suara.

Ketiga, diskusi dan debat merupakan sarana yang efektif untuk mengasah kemampuan berpikir kritis. Melalui dialog yang membahas isu-isu politik dan kebijakan publik, siswa dapat memperdalam pemahaman dan mempertajam perspektif siswa. Keempat, Undangan Narasumber: Mengundang pembicara dari KPU, pengamat politik, atau tokoh masyarakat untuk berbagi wawasan dan perspektif mereka. Kelima, klub debat atau organisasi siswa adalah wadah yang membahas isu-isu sosial dan politik. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami mencakup beragam bidang, seperti Pramuka, PMR, serta berbagai aktivitas lainnya. Melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan bentuk-bentuk organisasi lainnya, kami berusaha menyampaikan informasi politik dan melaksanakan kegiatan insidental, seperti sosialisasi pemilu, menjelang Pemilihan Umum dan Pilkada. Ini merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan

kesadaran politik di kalangan siswa. Keenam, pendidikan nilai demokrasi melibatkan penanaman prinsip-prinsip seperti toleransi, pluralisme, dan partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah.

Sekolah-sekolah di Kabupaten Lembata memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa SMA sebagai pemilih pemula. Upaya ini diwujudkan melalui integrasi materi politik ke dalam pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan, pelaksanaan simulasi pemilu, diskusi tematik, serta penyelenggaraan berbagai program ekstrakurikuler. Selain itu, sekolah juga dapat menjalin kerja sama dengan lembaga seperti KPU dan tokoh masyarakat untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam. Dengan pendekatan ini, sekolah berkontribusi dalam membentuk generasi pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan siap berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam sistem demokrasi.

5.2 SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik bagi siswa SMA yang merupakan pemilih pemula dapat memberikan pemahaman yang lebih baik serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. Pendidikan politik diharapkan menjadi alternatif yang efektif dalam memberikan informasi politik yang tepat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik siswa. Dengan demikian, diharapkan siswa akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, baik di tingkat sekolah maupun dalam konteks yang lebih luas seperti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun saran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: pertama, dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, penting bagi guru untuk memahami pengetahuan awal siswa serta beragam ketangkasan dan kecakapan berpikir mereka. Selain itu, guru perlu lebih proaktif dalam memberikan pendidikan politik di sekolah, guna meningkatkan partisipasi siswa sebagai pemilih pemula. Kedua, bagi kepala sekolah, penting untuk mensosialisasikan pendidikan politik kepada guru-guru lainnya. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengajarkan nilai-nilai tersebut dan menjadikannya sebagai kebiasaan di sekolah. Dengan cara ini, siswa akan terbiasa dan memahami hak-hak mereka

sebagai warga negara yang baik, yang seharusnya ditanamkan sejak usia dini. Penelitian ini masih terbatas pada analisis dan kajian mengenai pendidikan politik di SMAN 1 Balauing. Oleh karena itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian dan analisis yang lebih mendalam untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa di sekolah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, F. N. (2019). Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Akhmad, Z., Thamrin, U., & Santosa, R. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Smk Negeri 5 Kabupaten Bulukumba. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 202–216. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i4.712>
- Alwi, I. (2023). *Manajemen Program Organisasi Intra Sekolah dalam Pengembangan Karakter Kepemimpinan Siswa (Studi Kasus di MAN 2 Ponorogo)*.
- Andriana, P., & Hidir, A. (2024). *Pemilihan Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa SMAN 1 Gunung Toar*. 1(2), 701–709.
- Asdrayany, D., Muhajir, M. N., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). *Analisis Konsep, Teori dan Lingkup Politik Pendidikan*. 06(01), 6840–6852.
- Azirah. (2019). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 6(2), 86–100. <https://doi.org/10.32505/politica.v6i2.2735>
- Bima Sakti, A., Wingkolatin, & Marwiah. (2024). Analisis Peran Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Sebagai Pembentuk Karakter Kepemimpinan Siswa di SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 1(3), 317–330.
- Boinauw, I., Arifin, M., & Kadir, A. (2024). *Jurnal Abdi Insani Sosialisasi Pendidikan Politik Pada Pemilih Pemula (Siswa / Siswi Sma Kelas Xii) Di Kota Sorong Pada Pemilu Serentak Tahun 2024*. 10, 654–660.
- BR, E. J., Firman, A., Surbakti, F. A., & ... (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Pinggiran Sungai Deli Dalam Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilu 2024. *Hukum Dinamika ...*, 05(4).

- Didik, P. (2024). *Pelaksanaan Kewajiban Pendidik dalam Menghadirkan Tanggung Jawab Terhadap Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri*. 4, 9394–9406.
- Djabba, R., & Ilmi, N. (2022). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *Publikasi Pendidikan*, 12(3), 264. <https://doi.org/10.26858/publikan.v12i3.35491>
- Gobel, E. Y., Yunus, R., & Mahmud, R. (2021). Implementasi Pendidikan Politik Melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler Di Sma Negeri 1 Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jambura Journal Civic Education*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.37905/jacedu.v1i1.11131>
- Gurning, F. L., Simangunsong, M., Sihombing, A. F., Tobing, D. L., Pasaribu, A., Ritonga, N. S., Siregar, D. S., & Prayetno. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Eksekutif Tahun 2024. *Journal of Teaching and Science Education (JOTASE)*, 1(1), 34–39.
- Hamid, S. Al. (2024). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Partisipasi Politik Remaja*. 02(02), 1–7.
- Hasanah, S. U., & Sulha. (2023). Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Siswa Sebagai Pemilih Pemula Di Kota Singkawang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 44–56. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i2.7475>
- Hindun, N. S., Ulya, I., & Alnashr, M. S. (2021). Pendidikan Politik bagi Anak melalui Organisasi Siswa Madrasah Ibtidaiyah. *Dawuh Guru: Jurnal Pendidikan MI/SD*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.35878/guru.v1i1.268>
- Islah, K., Juardi, J., & Nasim, E. S. (2020). Sosialisasi Pemilu 2019 Untuk Pemilih Pemula Kota Depok. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 46–50. <https://doi.org/10.31334/jks.v3i1.969>
- Isyanawulan, G., & Hendarso, Y. (2023). *Nawadeepa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Pendidikan Literasi Politik Untuk Siswa SMA Negeri 25 Kabupaten Banyuasin*. 1.
- Journal, C. D., Zairudin, A., Faqih, M. I., Demografi, B., & Pemula, P. (2022). *Pemilih Pemula*. 3(3), 1809–1815.

- Keguruan, F., Ilmu, D. A. N., & Sriwijaya, U. (2020). *Analisis sikap siswa sma sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum presiden dan legislatif 2019*.
- Lubis, C. T. I. (2023). Penanaman Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Serentak 2024. *Jurnal Bakti Sosial*, 2(1), 36–43.
- Ma, L., Luo, J., 桑原信弘, Hiramoto, T., Onumata, Y., Manabe, Y., Takaba, H., Corporation, E., Energy, A., Flory, P. J., Æ, Ì., Sato, T., Geometry, R., Analysis, G., Muraki, M., Nakamura, K., Geometry, R., & Analysis, G. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology*, 224(11), 122–130.
- Mahyudin, M., Reni, A., Darni, D., & Hasimin, H. (2022). Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula. *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.30651/hm.v3i1.12302>
- Muhammad, H. A., & Babas, U. (2020). *Kota Jambi Dalam Menghadapi Pilkada Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020*. 3(3), 19–24.
- Nasution, F., Adella, M., Walidaini, I., & Harahap, M. (2024). *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pendidikan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan dan Peran Guru Bimbingan Konseling El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4(1), 39–47. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.3133>
- Noprianto, Lawani, U. S., Ismail, R., & Lukoting, F. (2023). *Pendidikan Politik Dalam Membangun Kesadaran Demokrasi Pemilih Pemula Jelang Pemilu 2024*. 1(1), 23–33.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407>
- Pada, U., Pemula, P., & Kabupaten, D. I. (2022). *Impelementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pemilihan*. 04(4), 17–22.

- Pahmi, D. M., Dedi, A., & Suwarlan, E. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya. *Universitas Galuh*, 462–474.
- Politik, P., Kelas, S., & Di, X. I. (2024). *PERAN Guru Pendidikan Pancasila Pada Proyek Suara Demokrasi Dalam Upaya Meningkatkan*. 8, 123–133.
- Rahman, A. (2017). *Peran Sekolah Sebagai Sarana Sosialisasi Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula*. November.
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Razaqa, M. K., Prawira, F. R., & Santoso, G. (2022). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Pengaruh Media Sosial Terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula Siswa Pada Pemilu* *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 01(02), 132–141.
- Riau, U., & Sorong, P. P. (2023). *Pembelajaran Ppkn Di Persekolahan*. 10(2), 160–168.
- Rukmini, B. S. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan DEWANTARA ...*, 7, 40–47.
- Sa'ban, L. M. A., Nastia, N., & Wijaya, A. A. M. (2022). Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas dalam Menghadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 31–37. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i1.207>
- Shalihudin, F., & Hermanto, F. (2021). *Demokratis Siswa Melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah Di Smp Negeri 22 Semarang*. 3(1), 75–82.
- Siregar, A. N. (2023). Pendidikan Politik Sebagai Wujud Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Kaum Milenial dalam Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Generasi Ceria Indonesia*, 1(2), 103–108. <https://doi.org/10.47709/geci.v1i2.3180>
- Smk, D. I., Salatiga, N., Mediatati, N., Studi, P., & Pendidikan, S. (n.d.). *DALAM Membentuk Karakter Siswa*. 54–61.

- Society, D. i. e. r. a., & Miqdad, K. (2024). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 " Menilik Isu Kewarganegaraan : Dinamika Perkembangan Global pada Era Society Partisipasi Politik Masyarakat Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 " Menilik Isu Kewarganegaraan*. 157–167.
- Sutarna, I. T., Subandi, A. S., & Zitri, I. (2023). Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula: Inisiatif Untuk Integritas Pemilu. *Transformasi : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1), 38. <https://doi.org/10.31764/transformasi.v3i1.14723>
- Syarifah, F. N., Cahyani, H. D., & Kamilah, I. N. (2022). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wawasan Demokrasi Warga Negara Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 01(02), 122–131.
- Tâm, T., Và, N. C. Ú U., Giao, C. Ê N., Ngh, C., & Chu, Á n b ù i. (2016). 濟無 *No Title No Title No Title*. 01, 1–23.
- Tamrin, U., Rs, A. H., Arsyad, A. A. J., Umar, N., & Kurniawan, D. (2024). *Analisis Peranan Pemilih Pemula dan Pentingnya Teknologi Digital untuk Pemilihan Umum 2024 di Indonesia (Studi Kasus : Pemilih Pemula SMA Negeri 20 Makassar)*. 2(2), 52–60.

Lampiran 1 Lembar wawancara untuk siswa pemilih pemula

A. Lembar wawancara untuk siswa pemilih pemula

No	Indicator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pemahaman politik	1. Apa yang Anda ketahui tentang politik?	"Politik adalah proses mengambil keputusan yang memengaruhi masyarakat."
		2. Lembaga pemerintah apa yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pemilu?	"KPU (Komisi Pemilihan Umum)."
2.	Pemahaman tentang Pemilih Pemula	3. Apa yang Anda ketahui tentang pemilih pemula?	"Pemilih pemula adalah individu yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya."
		4. Apakah Anda termasuk pemilih pemula?	"Ya, saya termasuk pemilih pemula."
3.	Pengalaman Sebagai Pemilih	5. Apakah Anda sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu tahun 2024?	"Ya, saya sudah terdaftar."
		6. Apakah Anda akan menggunakan hak suara Anda dalam Pilpres 2024?	"Ya, saya telah menggunakan hak suara."
		7. Jika menggunakan hak suara, apakah Anda meminta pendapat orang lain terlebih dahulu atau memilih berdasarkan hati nurani?	"Saya memilih berdasarkan hati nurani dan informasi calon."
4.	Alasan Memilih Kandidat	8. Kenapa Anda memilih hal (calon/partai politik) tersebut?	"Karena visi dan program kerjanya mendukung kebutuhan masyarakat."
5.	Profil Calon	9. Bagaimana profil calon	"Jujur, memiliki

	Ideal	presiden ideal menurut Anda?	visi yang kuat, dan peduli pada masyarakat."
--	-------	------------------------------	--

B. Lembar wawancara untuk Pendidik

No.	Indicator	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Pendidikan Politik di Sekolah	1. Apakah sekolah Anda memberikan pendidikan politik bagi siswa, terutama terkait pemilih pemula?	"Ya, kami memberikan pendidikan politik melalui pelajaran PPKn dan simulasi pemilu."
		2. Bagaimana cara sekolah Anda melibatkan siswa dalam kegiatan pendidikan politik?	"Melalui diskusi kelas, pemutaran video edukasi, dan pembagian materi Pemilu dari KPU."
2.	Strategi Pengajaran	3. Apa strategi yang digunakan dalam mengajarkan pendidikan politik kepada pemilih pemula?	"Dengan diskusi, kunjungan ke instansi pemerintahan, dan praktek simulasi pemilu."
3.	Pemahaman tentang Pemilih Pemula	4. Menurut Anda, bagaimana minat dan keterlibatan siswa dalam proses pendidikan politik?	"Siswa cukup antusias jika kegiatan dibuat interaktif seperti simulasi pemilu atau debat."
4.	Tantangan dan Harapan	5. Apa tantangan utama dalam memberikan pendidikan politik kepada siswa?	"Minimalnya waktu khusus untuk kegiatan politik di luar kurikulum."

		6. Apa harapan Anda untuk pengembangan pendidikan politik di sekolah?	"Kami berharap pemerintah dapat memberikan lebih banyak dukungan berupa fasilitas atau sosialisasi langsung.



Lampiran 1. Surat Izin penelitian

Kampus : GKB 4 Lantai 1-3 Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang
Telp 0341 464319 ext. 318, 319 | email : pascasarjana@umm.ac.id

UMM
1964
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

Nomor : E.7.d/924/DPPs-UMM/XII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Ijin Penelitian**

Malang, 30 Desember 2023

Kepada Yth :
Kepala SMA Negri 1 Balauring
Jln Trans Lembata, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur

Di-
Tempat

UMMPASTI
BERSAMA
MENDIRI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, dengan ini memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan Ijin melakukan penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : MA'MUR APELABI
NIM : 202310660211051
Nomor Telpon : 082147016749
Program Studi : MAGISTER PEDAGOGI
Judul : IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI SISWA SMA SEBAGAI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN LEMBATA

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,
Prof. Akhsanul In'am, Ph.D.

Tembusan :
1. Arsip

STARS
IN-QA

Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sulami No 166 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 562 060

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

Gambar 1 surat izin penelitian



FEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 BALAURING



TERAKREDITASI B
NPSN : 69856246 / NSS : 40124140600
Jln. Tj. Lohu Desa Balauring Kec. Omesuri-Lembata-NTT
Email : smn1balauring@yaho.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : DPK/001/SMAN-BLG/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdullah Lamawulo, S. Pd
NIP : 19790902 200501 1 007
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jln. Tanjung Lohu, Desa Balauring, Kec. Omesuri, Kab. Lembata

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MA'MUR APELABI
NIM : 202310660211051
Program Studi : Magister Pedagogi
Universitas : Muhammadiyah Malang

Telah melakukan Penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan Tesis dengan judul "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI SISWA SMAN SEBAGAI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN LEMBATA" pada SMA NEGERI 1 BALAURING.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan dalam urusan seperlunya.

Balauring, 23 Juli 2024

Kepala Sekolah,



Abdullah Lamawulo, S. Pd
NIP : 19790902 200501 1 007

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2. Surat selesai penelitian dari sekolah

Lampiran 2. Dokumentasi kegiatan penelitian



Gambar 4.1. 1 kegiatan mengajar guru kelas XII SMAN 1 Balauring



Gambar 4.1. 2 dokumentasi kegiatan pemilihan ketua Osis SMAN 1 Balauring



Gambar 4.1. 3 Penyuluhan partisipasi politik siswa kelas XII SMAN Balauring



Gambar 4.1. 4 Kegiatan diskusi guru dan siswa siswa kelas XI SMAN 1 Balauring



Gambar 1. Wawancara bersama Kepala sekolah SMAN 1 Balauring



Gambar 2. Wawancara bersama Kaur Kesiswaan



Gambar 3. Wawancara bersama guru mapel PPKn



Gambar 4. Wawancara Bersama siswa/siswi kelas XI SMAN 1 Balauring



Gambar 5. Wawancara sala satu siswa kelas XII SMAN 1 Balauring



Gambar 6. Simulasi pemilihan ketua Osis SMAN 1 Balauring

